



## Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Winda Fionita<sup>1</sup>, Rara Lauchia<sup>2</sup>, Septia Windari<sup>3</sup>, Hansein Arif Wijaya<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Jambi, Indonesia

E-mail: [windaionita25@gmail.com](mailto:windaionita25@gmail.com), [raralauchia02@gmail.com](mailto:raralauchia02@gmail.com), [septia20092002@gmail.com](mailto:septia20092002@gmail.com),  
[hanseinwijaya@unja.ac.id](mailto:hanseinwijaya@unja.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2024-04-09 Revised: 2024-05-27 Published: 2024-06-01  <b>Keywords:</b> <i>Monitoring; Evaluation; Education Policy.</i>	The aim of this research is to provide an overview of how education policy is monitored and evaluated. The method used in this research uses a library research method or approach. Library research can be defined as a series of activities related to collecting library data, reading and taking notes, and processing research materials. Based on the results of literature studies, monitoring education policy refers to monitoring situations and conditions, including actions and activities related to education policy in the form of education regulations, curriculum, learning processes, and all government actions related to education. To get an overview of education and find out what, why, and how the current state of education is. There are eight commonly used monitoring models, namely the goal-oriented assessment model, the goalless assessment model, the formative and summative assessment model, the facial assessment model, and the responsive assessment model (responsive assessment model, CIPP assessment model (CIPP)). Evaluation model)). CSE-UCLA Evaluation Model (University of California, Los Angeles Center for Evaluation Research), Discrepant Evaluation Model.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2024-04-09 Direvisi: 2024-05-27 Dipublikasi: 2024-06-01  <b>Kata kunci:</b> <i>Monitoring; Evaluasi; Kebijakan Pendidikan.</i>	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan pendidikan dipantau dan dievaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Berdasarkan hasil studi literatur, pemantauan kebijakan pendidikan mengacu pada pemantauan terhadap situasi dan kondisi, termasuk tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam bentuk peraturan pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan seluruh tindakan pemerintah terkait pendidikan. Untuk mendapatkan gambaran tentang pendidikan dan mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana keadaan pendidikan saat ini. Ada delapan model pemantauan yang umum digunakan yaitu model penilaian berorientasi tujuan, model penilaian tanpa tujuan, model penilaian formatif dan sumatif, model penilaian wajah, dan model penilaian responsif (model penilaian responsif, model penilaian CIPP (CIPP)). Model evaluasi)). Model Evaluasi CSE-UCLA (Pusat Penelitian Evaluasi Universitas California, Los Angeles), Model Evaluasi Discrepant.

### I. PENDAHULUAN

Sistem pendidikan nasional merupakan suatu sistem terpadu dari seluruh satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menyikapi tuntutan reformasi pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan (Khairina, 2023). Sejak tahun 2003, undang-undang ini telah diganti dengan Undang-undang No.20 Tahun 2003, yang disahkan pada tanggal 11 Juni 2003. Alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menyatakan: "Kehidupan rakyat, dalam hal ini rakyat, harus terdidik". Meliputi seluruh warga negara Indonesia, baik

yang bersekolah di sekolah negeri maupun yang bersekolah di sekolah swasta.

Dalam hal ini kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia memerlukan instrumen kebijakan yang tepat dari pemerintah, yaitu pengembangan kebijakan harus didasarkan pada orientasi tujuan yang kuat (Diputra, et al, 2020). Kebijakan di bidang pendidikan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia tidak hanya berbentuk Undang-Undang. Persoalan penting yang perlu ditekan adalah apakah kebijakan pendidikan dilaksanakan dengan benar dan mencapai hasil yang diharapkan, dan apakah hasil akhir dari

semua kebijakan konsisten dengan tujuan pendidikan (Gunawan, et al, 2023).

Perlunya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pendidikan nasional dalam upaya mengetahui seberapa akurat dan seberapa baik hasil yang dicapai pemerintah. Untuk memahami lebih dalam mengenai monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan, artikel ini membahas mengenai monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Sesuai dengan karakteristik masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka menggunakan Metode Riset kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang diamati, pendekatan kualitatif penulis gunakan untuk menganalisis kajian terhadap monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan. Maka dengan sendirinya peng-analisaan data ini lebih difokuskan pada Penelitian Kepustakaan (Library Research) yakni dengan membaca, menelaah dan mengkaji buku-buku dan sumber tulisan yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas (Darmalaksana, 2020).

Pada metode ini, peneliti mengumpulkan artikel ilmiah nasional yang relevan dengan judul penelitian yaitu Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. Dalam mengumpulkan artikel-artikel tersebut, peneliti memilih dua kata kunci untuk memilah artikel yaitu berkaitan dengan monitoring, evaluasi dan kebijakan. Dalam penelitian ini menggunakan objek formal yang di mana penelitian ini berupa data, yaitu data yang berhubungan dengan tinjauan kritis kajian terhadap implementasi program humas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder, data sekunder adalah data yang ada dalam pustaka-pustaka, data sekunder didapatkan dari jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional (Darmalaksana, 2020).

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya pengumpulan informasi yang berkelanjutan dikenal sebagai monitoring. Upaya ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada pengelola program dan pemangku kepentingan tentang indikasi awal kemajuan dan kekurangan pelaksanaan program dalam rangka perbaikan untuk mencapai tujuan program (Kemendikbud, 2013). Monitoring adalah upaya untuk memantau apakah program berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, apakah ada

hambatan, dan bagaimana para pelaksana kebijakan mengatasi hambatan tersebut. Hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi cara yang bagus untuk mengontrol seluruh proses implementasi (Koswara, 2005).

Pemimpin melakukan monitoring untuk melihat bagaimana organisasi berjalan selama kegiatan berlangsung, menilai pencapaian tujuan, dan menemukan faktor pendukung dan penghambat program. Data dikumpulkan dan dianalisis dalam monitoring (pemantauan). Hasilnya diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pemimpin untuk dapat melakukan perbaikan. Mengamati keadaan atau kondisi termasuk tindakan atau bisa juga disebut pengamatan. Tujuan pengamatan adalah untuk menggunakan semua data atau informasi yang diperoleh dari pengamatan tersebut sebagai dasar untuk membuat keputusan selanjutnya (PP No. 39 Tahun 2006). Warman, et al (2023), dalam artikelnya mengatakan pemerintah bertanggungjawab secara mutlak untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia melalui kebijakan pendidikannya. Pendidikan nasional didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, dan berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggung jawab terhadap tuntutan zaman.

Umumnya suasana dan proses pembelajaran, apapun kurikulumnya, masih mengutamakan proses mendengar, mencatat dan menghafal (rote learning), belum sampai kepada proses pembelajaran yang diharapkan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), yang terkenal dengan empat pilar belajar, yakni "learning to know, learning to do, learning to live together and learning to be." Sistem Pendidikan Nasional adalah "sebuah sistem yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional" (Safrial, 2022). Widiastuti, et al (2023), dalam artikelnya mengatakan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia bukan hanya undang-undang, ini adalah proses dan hasil dari perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dimulai dengan visi dan misi pendidikan dan dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang bagi masyarakat. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya

tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.

Menurut Suryana (2010), monitoring kebijakan pendidikan berarti mengamati secara menyeluruh suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan, seperti regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, dan segala hal yang dilakukan pemerintah terkait dengan pendidikan. Tujuan dari monitoring kebijakan pendidikan adalah untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang apa, mengapa, dan bagaimana keadaan pendidikan saat ini sebenarnya. Kaufman dan Thomas telah mengemukakan ada delapan Model monitoring dan Evaluasi Program seperti berikut ini (Moerdiyanto, 2006).

1. Goal-oriented Evaluation Model (Model Evaluasi berorientasi Tujuan)

Model evaluasi pertama dibuat pada tahun 1961 dan berpusat pada "sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah ditentukan dapat tercapai." Prestasi belajar siswa, kinerja guru, efektivitas PBM, dan kualitas layanan prima adalah indikator pencapaian tujuan.

2. Goal-free Evaluation Model (Model Evaluasi Bebas Tujuan)

Model evaluasi ini tidak didasarkan pada tujuan program kegiatan, evaluasi ini berfokus pada pihak eksternal, pihak konsumen, stake holder, dewan pendidikan, dan masyarakat. Evaluasi ini terfokus pada perubahan perilaku yang terjadi sebagai akibat dari penerapan program, melihat dampak sampingan yang diharapkan dan tidak diharapkan, dan membandingkannya dengan sebelum program dimulai. Evaluasi juga membandingkan antara manfaat dan kekurangan program.

3. Formatif-Summatif Evaluation Model

Evaluasi model ini dikembangkan oleh Michael Scriven, dengan membedakan evaluasi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Evaluasi Formatif

Bersifat internal yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, mengembangkan program dan personel, dan mengetahui perkembangan program yang sedang berjalan. Evaluasi formatif seperti monitoring dan supervisi dilakukan selama kegiatan program dan menjawab berbagai pertanyaan:

1) Apakah program berjalan sesuai rencana?

- 2) Apakah semua komponen berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing?
- 3) Jika tidak apakah perlu revisi, modifikasi?

b) Evaluasi Sumatif

Setelah program berakhir, evaluasi ini dilakukan untuk menentukan keberhasilan program, memberikan pertanggung jawaban atas tugas, dan memberikan saran untuk melanjutkan atau menghentikan program pada tahun berikutnya. Evaluasi akan dapat menjawab pertanyaan:

- 1) Sejauh mana tujuan program tercapai?
- 2) Perubahan apa yang terjadi setelah program selesai?
- 3) Apakah program telah dapat menyelesaikan masalah?
- 4) Perubahan perilaku apa yang dapat ditampilkan, dilihat dan dirasakan setelah selesai mengikuti pelatihan?

4. Countenance Evaluation Model (Model Evaluasi)

Evaluasi memfokuskan pada program pendidikan, untuk mengidentifikasi tahapan proses pendidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Model ini ada 3 tahapan program, yaitu:

- a) Antecedent phase, pada tahap sebelum program dilaksanakan. Evaluasi akan melihat kondisi awal program, faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan/kegagalan, kesiapan siswa, guru, staf administrasi, dan fasilitas sebelum program dilaksanakan
- b) Transaction phase, pada saat program diimplementasikan. Evaluasi difokuskan untuk melihat program berjalan sesuai dengan rencana atau tidak, bagaimana partisipasi masyarakat, keterbukaan, kemandirian kepala sekolah
- c) Outcomes phase, pada akhir program untuk melihat perubahan yang terjadi sebagai akibat program yang telah dilakukan.
  - 1) Apakah para pelaksana menunjukkan perilaku baik, kinerja tinggi?
  - 2) Apakah klien (konsumen) merasa puas dengan program yang dilaksanakan?
  - 3) Perubahan perilaku apa yang dapat diamati setelah program selesai?

5. Responsive Evaluation Model (Model Evaluasi Responsif)

Mempertimbangkan kemajuan dalam manajemen personel dan perubahan perilaku

(behavior change), evaluasi model ini sesuai untuk program sosial, seni, humaniora, dan masalah-masalah yang memerlukan penanganan dengan aspek humaniora. Fokus evaluasi adalah bagaimana berbagai pihak bertindak terhadap program yang dilaksanakan dan bagaimana program tersebut berdampak.

#### 6. CIPP Evaluation Model (Model Evaluation CIPP)

CIPP singkatan dari Context, Input, Process, Product, adalah model evaluasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Menurut Stufflebeam, "Evaluation is the process of delineating, obtaining, and providing useful information for judging alternative decision making". Stufflebeam menggolongkan evaluasi menjadi empat jenis ditinjau dari alternatif keputusan yang diambil dan tahapan program yang dievaluasi. Dari empat tahapan evaluasi tersebut, setiap tahapan evaluasi adanya informasi pembuatan keputusan:

##### a) Evaluasi Context

Dilakukan pada tahap penjagaan yang menghasilkan informasi untuk keputusan perencanaan (planning decision). Evaluasi konteks akan melihat bagaimana kondisi kontekstual, apa harapan masyarakat, apa visi dan misi lembaga yang akan dievaluasi.

##### b) Evaluasi Input

Dilakukan pada tahap awal untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan tentang strategi pelaksanaan program. Evaluasi input akan mengevaluasi kondisi input (masukan), baik bahan baku maupun input instrumental. Bahan baku adalah input yang diproses menjadi output, misalnya, siswa dan siswa di lembaga pendidikan. Input instrumental, seperti guru, fasilitas, kurikulum, dan manajemen, adalah input yang membantu menjalankan program.

##### c) Evaluasi Process

Evaluasi proses yang dilakukan selama program berjalan akan memberikan informasi tentang bagaimana program dijalankan. Evaluasi ini akan memeriksa bagaimana kegiatan program dijalankan, partisipasi peserta, nara sumber atau guru, bagaimana guru atau instruktur menggunakan PBM di kelas, bagaimana dana digunakan, dan bagaimana guru dan siswa berinteraksi satu sama lain di kelas. Berapa persen keberhasilan yang telah dicapai, dan perkiraan tingkat keberhasilan

saat program selesai. Jenis keputusan adalah pelaksanaan (implementing decision).

##### d) Evaluasi Product

Dilakukan setelah program berakhir untuk mengevaluasi keberhasilannya. Sejauh mana tujuan telah dicapai, hambatan yang dihadapi dan solusinya. Tingkat keberhasilan program meliputi hal-hal seperti efektivitas, efisiensi, relevansi, produktivitas, dan sebagainya. Evaluasi produk memberikan informasi untuk keputusan kelanjutan program. Evaluasi produk juga merupakan tanggung jawab pimpinan atas program, yang merupakan tanggung jawab stake holder.

#### 7. CSE-UCLA Evaluation Model (Center for the Study of Evaluation, University of California at Los Angeles).

Evaluasi model CSE-UCLA hampir sama dengan model CIPP, termasuk kategori evaluasi yang komprehensif. Evaluasi CSE-UCLA melibatkan 5 tahapan evaluasi, yaitu:

##### a) Tahap pertama

Evaluasi dimulai dengan Needs Assessment, dimana evaluasi mengidentifikasi ada tidaknya perbedaan antara status program atau kondisi kenyataan (what is) dengan yang diharapkan (what should be). Apa problem yang dihadapi? Gap apa yang ada dalam lembaga?

##### b) Tahap kedua

Perencanaan dan juga pengembangan (program planning and development), melihat apakah program yang direncanakan sesuai untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan? Keputusan yang akan diambil adalah pemilihan strategi untuk mencapai tujuan program.

##### c) Tahap ketiga

Pelaksanaan, evaluasi terfokus pada implementasi program. Evaluasi akan menjawab pertanyaan:

- 1) Apakah program berjalan sesuai dengan rencana?
- 2) Bagaimana penampilan para guru, siswa?
- 3) Bagaimana kesan dan sikap orang tua dan masyarakat?
- 4) Bagaimana proses belajar mengajar?
- 5) Jenis rekomendasi antara lain: Apa yang perlu dirubah, diperbaiki, ditenahi agar pada tahap akhir program mencapai keberhasilan?

d) Tahap keempat

Hasil yang dicapai menentukan evaluasi. Sejauh mana program telah memenuhi sasarannya? Apakah perawatan menghasilkan hasil yang diinginkan?

e) Tahap kelima

Evaluasi difokuskan pada penilaian terhadap kemanfaatan program. Pertanyaan berkisar pada bagaimana keberadaan program? Bagaimana manfaat program terhadap personal dan lembaga? Jenis rekomendasi pada tahap ini adalah program perlu dikembangkan, diperpanjang, dimodifikasi, dikurangi atau bahkan dihentikan.

8. Discrepancy Evaluation Model (DEM) oleh Provus

Nasihi, et al (2023), yang dikembangkan oleh Malcom Provus, focus pada perbandingan hasil evaluasi dengan performansi standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi digunakan untuk pengambilan kebijakan tentang program yang telah dilaksanakan: akan ditingkatkan, akan dilanjutkan, atau dihentikan. Evaluasi program dengan model DEM melibatkan 4 tahap kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan organisasi atau program yang akan dievaluasi:

- a) Mengidentifikasi program (program definition), Evaluasi focus pada penentuan dan rumusan tujuan
- b) Penyusunan program (program installation), Evaluasi fokus pada isi atau substansi program, cara-cara, metode, mekanisme untuk mencapai tujuan
- c) Pelaksanaan kegiatan program (program implementation), Evaluasi difokuskan untuk mengukur perbedaan yang terjadi antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditentukan (standar).
- d) Hasil yang dicapai program (program goal attainment), Kegiatan evaluasi menginterpretasikan hasil temuan evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk pembuatan keputusan. Keputusan dapat berupa revisi program dan atau melanjutkan program kegiatan.

Evaluasi mengukur Performance pada setiap tahapan program, dan membandingkan dengan Standar yang telah ditentukan. Pertanyaan evaluasi dalam Model DEM:

- a) Apakah program sudah diidentifikasi dengan baik dan jelas?

- b) Apakah program telah disusun dengan baik?

- c) Apakah program dilaksanakan dengan baik, dan apakah tujuan pendukung (enabling objectives) dapat dicapai

- d) Apakah tujuan akhir program telah dapat dicapai.

Jaysurrohman, et al (2021), dalam artikelnya mengatakan monitoring dan evaluasi (ME) adalah dua kata yang berbeda yang mengacu pada kegiatan yang berbeda. Monitoring adalah upaya untuk memantau apakah program berjalan dengan baik sesuai dengan rencana, apakah ada hambatan, dan bagaimana pelaksana mengatasi hambatan tersebut. Moerdiyanto (2009), dalam artikelnya bahwa, hasil perencanaan yang sedang berlangsung menjadi cara yang bagus untuk dapat mengontrol seluruh proses implementasi. Faktor paling penting dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi adalah aturan yang disepakati dan diterapkan. Kemudian, kelangsungan hidup kegiatan harus dijamin, kejujuran sangat penting, dan fokus utamanya adalah pada tujuan program itu sendiri (Nur'Azizah, et al, 2023). Menurut Suryana (2010), adapun prinsip-prinsip monitoring sebagai berikut :

- a) Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus
- b) Monitoring harus menjadi umpan terhadap perbaikan kegiatan program organisasi
- c) Monitoring harus memberi manfaat baik terhadap organisasi maupun terhadap pengguna produk atau layanan.
- d) Monitoring harus dapat memotivasi staf dan sumber daya lainnya untuk berprestasi
- e) Monitoring harus berorientasi pada peraturan yang berlaku
- f) Monitoring harus obyektif
- g) Monitoring harus berorientasi pada tujuan program.

Menurut Nasihi, et al (2022) dalam artikelnya, Mengenai prinsip-prinsip evaluasi, dikemukakan ada 4 prinsip, yaitu:

- a) Prinsip berkesinambungan, artinya dilakukan secara berlanjut.
- b) Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus dievaluasi
- c) Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.

- d) Prinsip sahih, yaitu mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur

Koswara (2005), dalam artikelnya monitoring dan evaluasi kebijakan memiliki ciri-ciri umum, sebagai berikut:

a) Basic Social Research

Penelitian kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur kerja ilmiah

b) Technical Social Research

Penelitian kebijakan harus mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang dapat dikembangkan instrumen-instrumen teknisnya

c) Policy Research

Menghasilkan kebijakan public

d) Komprehensif

Penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dan relevan dengan persoalan yang sedang dikaji untuk dirumuskan kebijakan penyelesaian

Nasihi, et al (2022), selain memiliki ciri-ciri umum, penelitian kebijakan juga memiliki ciri-ciri secara khusus diantaranya adalah:

a) Memiliki fokus multidimensial

1) Penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dengan permasalahan yang sedang dirancang kebijakan untuk penyelesaiannya.

2) Penelitian kebijakan harus menjangkau seluruh variabel yang terkait dengan gagasan atau ide pengembangan sebagai upaya melakukan perubahan perubahan pendidikan / sosial.

b) Bersifat induktif – empirik

1) Perumusan teori (bahan kebijakan) berbasis data bukan berbasis teori

2) Tidak dimulai dengan perumusan proposisi dan hipotesis

3) Berbasis teori vertechin, tetapi tidak selalu mencari makna, karena kebijakan memerlukan indeks angka

4) Dengan demikian data penelitian harus diolah dengan menghitung frekuensi dan distribusi frekuensi.

5) Data penilaian kebijakan harus diolah dan dianalisis dari analisis kecenderungan ketergantungan dan ramalan

6) Berorientasi kedepan dengan memperhatikan kejadian sebelumnya

7) Penelitian kebijakan harus berorientasi ke masa depan (visioner)

8) Penelitian kebijakan harus mampu menjelaskan ramalan yang terukur dan

meyakinkan seluruh pemangku kepentingan

9) Penelitian kebijakan harus memiliki dealektika sejarah dengan kejadian sebelumnya.

c) Berorientasi permintaan pemangku kepentingan

1) Penelitian kebijakan harus sesuai dengan hasil penelitian terhadap kebutuhan dan permintaan target grup dari kebijakannya itu

2) Penelitian kebijakan harus menghasilkan rumusan-rumusan yang implementatif, mudah dikontrol dan bahkan bisa diintervensi

3) Melahirkan rumusan yang meyakinkan dengan menjelaskan nilai lebih dari kebijakannya itu sehingga masyarakat bisa menerima karena rasionalismenya bukan karena otoritarianisme kekuasaan

Keterlibatan kedua pihak dalam evaluasi kebijakan ini bergantung pada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan (Sigit, 2010). Dalam hubungan teknokratik, pembuat kebijakan memiliki otoritas yang sangat besar, bahkan hampir mutlak, dan pelaksana harus menerima evaluasi yang dibuat oleh pembuat kebijakan. Di sisi lain, dalam hubungan swasta birokratis, keterlibatan pembuat kebijakan sangat kecil karena sebagian besar otoritas evaluasi berada di tangan pelaksana (Safrial, et al, 2010). Sementara itu, aktor kebijakan tidak formal biasanya berada di luar arena karena mereka harus menjadi aktor kebijakan formal jika mereka ingin memberikan penilaian secara formal melalui arena. Peserta kebijakan tidak formal ini biasanya melakukan penilaian melalui media. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa lama, hasil penilaian akhirnya juga sampai kepada pelaksana (Gunawan et al, 2023).

Selama proses penilaian, tidak jarang aktor-aktor formal dan non-formal bekerja sama atau membentuk forum. Forum ini dibuat dengan sengaja untuk memberikan penilaian kebijakan yang menyeluruh dengan menggabungkan perspektif yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Mereka yang termasuk dalam kelompok non-formal yang menilai kebijakan termasuk partai politik, organisasi massa, kelompok minat, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, individu, dan media

massa. Mereka juga termasuk masalah yang terkait dengan evaluasi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan.

Menurut Nasihi et al, (2022), ada problema-problema dalam monitoring dan evaluasi kebijakan tersebut ialah sebagai berikut:

a) Bila tujuan kebijakan tersebut tidak jelas

Kompromi dan kesepakatan yang dipaksakan selama proses formulasi kebijakan menyebabkan ketidakjelasan tujuan seperti itu. Kompromi dan konsensus seperti itu dipaksakan karena dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan. Jika tidak ada kesepakatan, mayoritas peserta kebijakan mungkin tidak setuju dengan formulasi kebijakan. Selain itu, tidak disetujui berarti tidak dapat dilakukan. Karena itu, tujuan yang dirumuskan biasanya tidak jelas dan bisa bermakna ganda, padahal makna ganda justru membuat evaluasinya lebih sulit.

b) Cepatnya perkembangan masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut

Kasus ini menyulitkan evaluasi kebijakan, oleh karena itu masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh kebijakan mungkin juga sudah berubah dan berganti dengan masalah yang lainnya. Masalah-masalah yang bermaksud dipecahkan oleh formulasi dan implementasi kebijakan sudah tidak ada, sementara masalah baru yang bahkan tidak ada kaitannya dengan masalah lama muncul.

c) Tidak jelas masalahnya, sumber masalah dan gejala masalahnya

Ketidakjelasan demikian bisa terjadi karena antara masalah, sumber masalah, dan gejala masalah sudah tumpang tindih. Hal ini terjadi karena masalah-masalah tersebut golongan masalah sosial, antara yang satu dengan yang lain kadang-kadang saling interchange.

d) Terkaitnya antara masalah satu dengan masalah lain

Sebagai contoh, sukar memisahkan antara masalah kebodohan, keterbelakangan dan kemiskinan. Sebab masyarakat yang bodoh dan terbelakang cenderung miskin, dan sebaliknya pada masyarakat yang miskin juga cenderung bodoh dan terbelakang.

e) Subjektifnya masalah kebijakan

Ini dapat diketahui dari berbedanya masalah menurut persepsi orang satu

dengan menurut persepsi orang lain. Bahkan sesuatu yang oleh seseorang dianggap sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan, justru dianggap sebagai sesuatu yang menguntungkan dan oleh karena itu harus dipertahankan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Monitoring kebijakan pendidikan berarti mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan yang berupa regulasi pendidikan, kurikulum, proses pembelajaran, maupun segala hal yang dijalankan oleh pemerintah berkaitan dengan pendidikan sehingga menemukan gambaran yang jelas apa, mengapa, serta bagaimana sesungguhnya kondisi pendidikan yang ada. Ada delapan model monitoring yang biasa dilakukan yaitu:

1. Goal-oriented Evaluation Model (Model Evaluasi berorientasi Tujuan).
2. Goal-free Evaluation Model (Model Evaluasi Bebas Tujuan).
3. Formatif-summatif Evaluation Model.
4. Countenance Evaluation Model (Model Evaluasi).
5. Responsive Evaluation Model (Model Evaluasi Responsif).
6. CIPP Evaluation Model (Model Evaluation CIPP).
7. CSE-UCLA Evaluation Model (Center for the Study of Evaluation, University of California at Los Angeles).
8. Discrepancy Evaluation Model (DEM) oleh Provus.

Aktor yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi pendidikan terdiri dari aktor formal yaitu administrator pembuat dan pelaksana kebijakan, serta aktor non formal yang terdiri dari media masa, partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian kajian terhadap monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan dalam penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan. Saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif terkait kajian terhadap monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Diputera, A. M., Damanik, S. H., & Wahyuni, V. (2022). Evaluasi kebijakan pendidikan karakter profil pelajar pancasila dalam kurikulum prototipe untuk pendidikan anak usia dini. *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 8(1),
- Gunawan, A., Surham, M. A., & Syaifuddin, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1),
- Jaysurrohman, R. A., Supandi, M., Wardani, M. T., Puthaen, M., & Setiawan, F. (2021). Problematika dalam Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia.
- Khairina, K., & Syaifuddin, M. (2023). Konsep Dasar Analisis Kebijakan. *BENING*, 10(2).
- Koswara, D. D. (2005). Implikasi monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan mutu sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, 3(1),
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal Dan Informal Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Petunjuk Teknis Monitoring Dan Evaluasi, 2013.
- Moerdiyanto (2009). Teknik Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Dalam Rangka Memperoleh Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Manajemen.
- Nasihi, A., & Hapsari, T. A. R. (2022). Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Indonesia Journal of Teaching and Learning (INTEL)*, 1(1).
- Nur'Azizah, N., & Aziza, M. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *TA'LIM: Jurnal Pendidikan Agama Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(02),
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- Safrial, R., Rahman, A. M., & Setiawan, F. (2022). Evaluasi Kebijakan Pendidikan: evaluasi, pendidikan, kebijakan. *EDU MANAGE-Journal of STAI Nurul Ilmi Tanjungbalai*, 1(2).
- Suryana, A. (2010). Strategi Monitoring dan Evaluasi (Monev) sistem penjaminan mutu internal sekolah. Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Warman, W., Komariyah, L., & Kaltsum, K. F. U. (2023). Konsep Umum Evaluasi Kebijakan. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Pendidikan*, 3.
- Widiastuti, I., & Cakranegara, P. A. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(3).
- Sigit, P. (2010). Makalah Diskusi Program Doktor, Penelitian Kebijakan Pendidikan. Universitas Negeri Malang